



Prosedur Konfirmasi untuk Menguji Asersi Keberadaan dan Hak Kepemilikan Piutang Usaha PT DIN oleh KAP JAPP

Dina Resti¹, Yusrina Alyani Tamimi¹, Kristanti², Zidni Husnia Fachrunnisa³

¹Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16425.

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Jalan Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15118.

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Sonosewu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55182.

Email Korespondensi: dina.resti.ak22@mhsw.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan prosedur audit konfirmasi piutang usaha oleh KAP JAPP pada PT DIN untuk menguji asersi keberadaan dan hak kepemilikan. Piutang usaha merupakan akun penting dalam laporan keuangan yang rentan terhadap salah saji dan kecurangan, sementara bukti empiris mengenai penerapan konfirmasi piutang pada perusahaan manufaktur otomotif masih terbatas. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui observasi langsung selama Praktik Kerja Lapangan. Dari 54 pelanggan, auditor mengirim konfirmasi kepada 44 pelanggan dan memperoleh tingkat respons sebesar 97,7%. Sebanyak 43 pelanggan memberikan tanggapan yang sesuai dengan catatan perusahaan, sedangkan satu pelanggan tidak merespons. Untuk mengatasi nonrespons tersebut, auditor menerapkan prosedur alternatif berupa penelusuran pembayaran setelah tanggal neraca dan pemeriksaan dokumen pendukung, seperti faktur, surat jalan, dan bukti penerimaan barang. Hasilnya menunjukkan bahwa piutang tersebut tetap dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, tidak ditemukan selisih material antara catatan perusahaan dan hasil konfirmasi. Temuan ini menunjukkan bahwa saldo piutang usaha PT DIN telah memenuhi asersi keberadaan dan hak kepemilikan serta disajikan secara andal dalam laporan keuangan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan efektivitas konfirmasi positif sesuai SA 505, meskipun temuan masih terbatas pada studi kasus tunggal.

Kata kunci: Piutang Usaha; Asersi keberadaan; Asersi Hak Kepemilikan; Prosedur Konfirmasi.

Confirmation Procedures to Test the Assertion of the Existence and Ownership Rights of PT DIN Accounts Receivable by KAP JAPP

Abstract

This study evaluates the implementation of accounts receivable confirmation procedures performed by KAP JAPP at PT DIN to test the assertions of existence and rights. Accounts receivable represent a significant component of financial statements and are particularly vulnerable to misstatement and fraud, while empirical evidence on the application of receivable confirmations in automotive manufacturing companies remains limited. This research employed a descriptive method based on direct observation during an internship program. Of 54 customers, the auditor sent confirmations to 44 and obtained a response rate of 97.7%. A total of 43 customers provided responses consistent with the company's records, while one customer did not respond. To address this nonresponse, the auditor applied alternative procedures by tracing subsequent cash receipts and examining supporting documents, including invoices, delivery orders, and proof of goods receipt. The results demonstrated that the receivable could still be substantiated. Moreover, no material differences were identified between the company's records and the confirmation results. These findings indicate that PT DIN's accounts receivable satisfied the existence and rights assertions and were fairly presented in the financial statements. Practically, this study confirms the effectiveness of positive confirmation procedures in accordance with SA 505, although the findings remain limited to a single-case study context.

Keywords: Accounts Receivable; Existence Assertion; Ownership Rights Assertion; Confirmation Procedure.

How to Cite: Resti, D., Tamimi, Y. A., Kristanti, K., & Fachrunnisa, Z. H. (2026). Prosedur Konfirmasi untuk Menguji Asersi Keberadaan dan Hak Kepemilikan Piutang Usaha PT DIN oleh KAP JAPP. *Empiricism Journal*, 7(1), 235-248. <https://doi.org/10.36312/twgqvt571>



<https://doi.org/10.36312/twgqvt571>

Copyright© 2026, Resti et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas secara terstruktur kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang terkandung di dalamnya menjadi dasar bagi investor, kreditor, regulator, dan manajemen dalam menilai kondisi ekonomi perusahaan serta mengambil keputusan yang relevan. Karena itu, kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap akun material. Dalam konteks perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, salah satu akun yang memerlukan perhatian khusus adalah piutang usaha. Berbeda dengan penjualan tunai yang segera menghasilkan penerimaan kas, penjualan kredit menimbulkan klaim perusahaan terhadap pelanggan yang baru akan direalisasikan pada periode berikutnya. Kondisi ini menjadikan piutang usaha sebagai akun yang signifikan sekaligus rentan terhadap salah saji, baik yang timbul karena kesalahan pencatatan, kelemahan pengendalian, sengketa dengan pelanggan, maupun kecurangan.

Piutang usaha memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan, likuiditas, dan kualitas aset lancar perusahaan. Saldo piutang yang besar dapat menunjukkan aktivitas penjualan yang tinggi, tetapi pada saat yang sama juga dapat mengindikasikan meningkatnya risiko ketidaktertagihan, salah klasifikasi, atau pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, audit atas piutang usaha menjadi bagian yang esensial dalam pemeriksaan laporan keuangan. Mulyadi (2022) menegaskan bahwa audit piutang usaha bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Dalam praktik audit, tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam pengujian atas sejumlah asersi manajemen, terutama keberadaan, hak kepemilikan, kelengkapan, penilaian, dan penyajian. Namun demikian, tidak semua prosedur audit memiliki kemampuan yang sama dalam mendukung setiap asersi tersebut. Oleh karena itu, pemilihan prosedur yang tepat dan evaluasi atas efektivitasnya menjadi penting, terutama untuk akun piutang usaha yang umumnya bersifat material dan memiliki karakteristik risiko yang beragam.

Salah satu prosedur substantif yang paling lazim digunakan dalam audit piutang usaha adalah konfirmasi eksternal, khususnya konfirmasi positif. Prosedur ini dilakukan dengan meminta pihak pelanggan mengonfirmasi secara langsung saldo piutang yang tercatat pada tanggal tertentu. Literatur audit menunjukkan bahwa konfirmasi piutang usaha terutama efektif untuk mendukung asersi keberadaan, karena respons pihak ketiga memberikan bukti eksternal yang relatif andal bahwa saldo tersebut benar-benar ada pada tanggal pelaporan (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Barr-Pulliam et al., 2023). Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa konfirmasi piutang lebih informatif untuk membuktikan keberadaan dibandingkan untuk menguji kelengkapan atau penilaian, sehingga hasil konfirmasi tidak seharusnya difafsirkan sebagai bukti tunggal bagi seluruh asersi yang melekat pada akun tersebut (Sillanpää & Hautamäki, 2020; Pinto et al., 2020). Dengan kata lain, meskipun konfirmasi positif tetap menjadi prosedur audit yang sentral, efektivitasnya harus dipahami secara proporsional sesuai dengan tujuan asersi yang ingin diuji.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin relevan dalam lingkungan pelaporan keuangan yang menuntut pertimbangan yang lebih luas atas risiko kredit dan kualitas aset keuangan. Penerapan PSAK 71 berbasis *expected credit loss* menuntut entitas dan auditor untuk lebih cermat dalam menilai kemungkinan kerugian kredit atas piutang usaha (Amri, 2024). Dalam konteks ini, bukti audit atas piutang tidak cukup hanya menunjukkan bahwa saldo tersebut ada, tetapi juga harus dipertimbangkan bersama bukti lain yang mendukung hak kepemilikan, keterpulihan, dan kewajaran penyajiannya. Literatur menegaskan bahwa konfirmasi piutang memiliki keterbatasan langsung dalam mendeteksi salah saji yang berkaitan dengan kelengkapan dan penilaian, sehingga auditor perlu melengkapinya dengan prosedur lain, seperti pengujian rincian, prosedur analitis substantif, pemeriksaan dokumen pendukung, serta prosedur alternatif ketika respons konfirmasi tidak diperoleh (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Barr-Pulliam et al., 2023). Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas konfirmasi piutang usaha perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari strategi pembuktian audit yang bersifat multi-sumber.

Dalam praktiknya, efektivitas konfirmasi positif tidak hanya dipengaruhi oleh desain prosedur, tetapi juga oleh tingkat respons pelanggan, kualitas respons yang diterima, besaran saldo yang diuji, dan kecermatan auditor dalam melakukan tindak lanjut. Respons yang lengkap dan sesuai dengan catatan klien dapat memperkuat bukti atas keberadaan piutang. Sebaliknya, respons yang tidak valid, parsial, terlambat, atau tidak diperoleh sama sekali dapat menimbulkan kesenjangan bukti yang harus diatasi melalui prosedur tambahan. Caster et al. (2020) menekankan bahwa data hasil konfirmasi yang telah diterima tetap harus direkonsiliasi dengan sub-ledger piutang usaha, dan setiap perbedaan atau ketidaklengkapan respons memerlukan penelusuran lebih lanjut agar tidak menimbulkan salah saji yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, keberhasilan prosedur konfirmasi tidak hanya diukur dari jumlah surat yang dikirim, tetapi dari kualitas bukti yang dihasilkan, tingkat respons yang diperoleh, dan kecukupan tindak lanjut auditor terhadap seluruh pengecualian serta nonrespons.

Selain isu respons, perkembangan teknologi dan organisasi audit juga memengaruhi bagaimana prosedur konfirmasi dijalankan dan dinilai. Penggunaan konfirmasi elektronik, otomatisasi, serta dukungan teknologi dalam rekonsiliasi data semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan ketepatan waktu dan mengurangi kesalahan administratif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konfirmasi elektronik cenderung menghasilkan error rate yang lebih rendah dibandingkan proses manual atau campuran, meskipun kualitas hasil tetap dipengaruhi oleh desain proses, pengendalian, dan kapabilitas auditor yang mengelolanya (Caster et al., 2020). Di sisi lain, literatur juga mengingatkan bahwa otomatisasi tidak serta-merta menjamin kualitas audit yang lebih tinggi apabila auditor menjadi terlalu pasif dalam menerima bukti dan menurunkan skeptisisme profesionalnya (Barr-Pulliam et al., 2023). Demikian pula, praktik offshoring dan pembagian tugas dalam tim audit dapat memengaruhi proses pembelajaran, kualitas penelaahan, dan risiko perilaku yang mengancam mutu apabila tidak diimbangi dengan pelatihan dan supervisi yang memadai (Popova & Wright, 2018; Sabău et al., 2021; Zhang et al., 2023). Dengan demikian, evaluasi atas konfirmasi piutang usaha tidak lagi semata-mata berkenaan dengan prosedur teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola pelaksanaan, kualitas penelaahan, dan kemampuan auditor menjaga skeptisisme profesional.

Lebih lanjut, penelitian perilaku audit menunjukkan bahwa pertimbangan auditor atas bukti internal dan eksternal dipengaruhi oleh faktor kognitif, pola pikir, dan urutan penyajian bukti. Fehrenbacher et al. (2020) dan Vagner (2022) menunjukkan bahwa mindset auditor serta cara bukti disajikan dapat memengaruhi bagaimana auditor menilai reliabilitas informasi dan membobotkan hasil konfirmasi dalam keseluruhan keputusan audit. Guiral & Esteo (2006) juga menyoroti kemungkinan pengaruh recency effect dan sequencing effect dalam evaluasi bukti, yang dapat menyebabkan auditor memberi bobot berlebih pada informasi tertentu apabila prosedur tidak dirancang secara cermat. Temuan ini penting karena piutang usaha sering kali berada pada persimpangan antara bukti eksternal yang tampak kuat dan bukti internal yang menjelaskan konteks transaksi, potensi sengketa, atau keterlambatan pembayaran. Dalam situasi demikian, auditor perlu merancang prosedur konfirmasi dan prosedur alternatif dengan mempertimbangkan tidak hanya kecukupan bukti, tetapi juga bagaimana bukti tersebut diintegrasikan secara kritis ke dalam penilaian profesional.

Pada saat yang sama, tuntutan atas transparansi audit melalui pengungkapan key audit matters (KAMs) dan meningkatnya perhatian terhadap ketepatan pelaporan audit turut membentuk konteks evaluasi atas piutang usaha. Pinto & Morais (2018) serta Pinto et al. (2020) menunjukkan bahwa lingkungan regulasi dan praktik pelaporan audit dapat memengaruhi persepsi atas risiko dan keluasan prosedur yang diterapkan auditor, khususnya dalam area yang dianggap berisiko tinggi atau kompleks. Dalam akun piutang usaha, situasi tersebut dapat tercermin pada perlunya pendalaman prosedur ketika terdapat saldo besar, pelanggan korporasi dengan pola transaksi yang kompleks, tingkat respons yang tidak merata, atau indikasi risiko penagihan. Dengan demikian, efektivitas konfirmasi piutang usaha perlu dipahami sebagai bagian dari kerangka penilaian risiko audit yang lebih komprehensif, bukan sebagai prosedur yang berdiri sendiri.

Meskipun literatur telah cukup luas membahas fungsi, keterbatasan, dan pengembangan prosedur konfirmasi piutang usaha, bukti empiris yang secara khusus

menggambarkan efektivitas konfirmasi positif pada perusahaan manufaktur otomotif di Indonesia masih terbatas. Keterbatasan ini penting dicatat karena karakteristik industri manufaktur otomotif cenderung melibatkan volume transaksi tinggi, pelanggan korporasi, termin kredit yang bervariasi, dan nilai saldo piutang yang dapat bersifat material. Dalam konteks tersebut, respons pelanggan tidak selalu homogen, dan efektivitas konfirmasi tidak dapat diandaikan sama untuk seluruh populasi piutang. Di samping itu, belum banyak kajian yang mendokumentasikan secara rinci bagaimana auditor di Indonesia menindaklanjuti nonrespons, mengevaluasi pengecualian, dan menggunakan prosedur alternatif untuk mendukung asersi keberadaan serta hak kepemilikan piutang pada kondisi audit nyata. Padahal, bukti semacam ini penting untuk menjembatani diskusi normatif dalam literatur dengan praktik audit di lapangan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan efektivitas prosedur konfirmasi piutang usaha pada suatu penugasan audit di sektor manufaktur otomotif Indonesia. Fokus kajian tidak hanya terletak pada tingkat respons pelanggan sebagai indikator operasional keberhasilan konfirmasi, tetapi juga pada evaluasi atas jenis pengecualian yang muncul, proporsi perbedaan yang material, serta kecukupan prosedur alternatif ketika respons tidak diperoleh. Penekanan pada prosedur alternatif menjadi penting karena literatur audit secara konsisten menegaskan bahwa nonrespons tidak boleh dibiarkan menjadi area kosong dalam pembuktian audit; sebaliknya, nonrespons harus direspons dengan pengumpulan bukti lain yang andal melalui dokumen pendukung, bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca, maupun sumber pihak ketiga lainnya (Caster et al., 2020; Barr-Pulliam et al., 2023). Dengan menempatkan konfirmasi dan prosedur alternatif dalam satu kerangka evaluasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana auditor membangun kecukupan bukti atas piutang usaha.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas prosedur konfirmasi piutang usaha yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) JAPP terhadap PT DIN. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian menilai tingkat respons konfirmasi pelanggan sebagai indikator awal efektivitas pelaksanaan prosedur. Kedua, penelitian menelaah jenis dan jumlah pengecualian yang timbul dari hasil konfirmasi serta mengevaluasi apakah selisih yang ditemukan melampaui batas materialitas yang telah ditetapkan. Ketiga, penelitian menilai sejauh mana prosedur alternatif yang diterapkan auditor pada pelanggan yang tidak merespons mampu menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung asersi keberadaan dan hak kepemilikan piutang usaha.

METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain single-case study untuk menelaah pelaksanaan prosedur konfirmasi piutang usaha dalam audit laporan keuangan PT DIN oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) JAPP. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur audit dilaksanakan, bagaimana bukti dikumpulkan dan dievaluasi, serta bagaimana auditor membentuk kesimpulan atas asersi keberadaan dan hak kepemilikan piutang usaha dalam konteks penugasan nyata. Dalam kajian audit, pendekatan studi kasus relevan ketika peneliti hendak menggambarkan proses, pertimbangan, dan konteks organisasi secara rinci, terutama pada area yang menuntut integrasi antara dokumen, prosedur, dan penilaian profesional auditor (Ackers, 2016; Barr-Pulliam et al., 2023).

Pemilihan desain studi kasus tunggal juga didasarkan pada karakteristik objek yang diteliti, yaitu satu penugasan audit dengan fokus spesifik pada prosedur konfirmasi piutang usaha. Desain ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap tahapan audit, interaksi antara bukti internal dan eksternal, serta tindak lanjut auditor atas respons maupun nonrespons konfirmasi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan metodologis dalam penelitian audit yang semakin menekankan pentingnya observasi terhadap praktik aktual, penggunaan data kerja audit, serta penelaahan atas bagaimana teknologi, dokumentasi, dan pertimbangan auditor saling berinteraksi dalam pembentukan bukti audit (Byrnes et al., 2018; Barr-Pulliam et al., 2023).

Objek Penelitian dan Fokus Analisis

Objek penelitian ini adalah prosedur audit piutang usaha yang diterapkan oleh auditor KAP JAPP pada audit laporan keuangan PT DIN. Secara operasional, unit analisis penelitian difokuskan pada pelaksanaan prosedur konfirmasi piutang usaha, termasuk perencanaan, penentuan sampel pelanggan, pengiriman surat konfirmasi, pemantauan tanggapan, evaluasi balasan yang diterima, dan pelaksanaan prosedur alternatif untuk pelanggan yang tidak memberikan respons. Fokus ini dipilih karena konfirmasi eksternal merupakan salah satu prosedur substantif yang paling relevan untuk memperoleh bukti atas keberadaan piutang, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas desain prosedur, tingkat respons pihak ketiga, dan tindak lanjut auditor atas ketidaksesuaian atau nonrespons (Caster et al., 2020; Barr-Pulliam et al., 2023; Vagner, 2022).

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dua asersi utama, yaitu asersi keberadaan (*existence*) dan asersi hak kepemilikan (*rights and obligations/rights*) atas piutang usaha. Asersi keberadaan berkaitan dengan apakah saldo piutang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada pada tanggal pelaporan, sedangkan asersi hak kepemilikan berkaitan dengan apakah entitas memiliki hak yang sah atas piutang tersebut. Pemusatan perhatian pada dua asersi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konfirmasi eksternal paling kuat digunakan untuk menguji keberadaan, sementara evaluasi hak atas piutang memerlukan penelaahan lebih lanjut atas dokumen transaksi, hubungan kontraktual, dan bukti penerimaan kas atau dokumen pendukung lainnya (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Barr-Pulliam et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan konfirmasi sebagai prosedur tunggal, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian audit yang lebih luas.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen audit dan aktivitas pemeriksaan yang berkaitan langsung dengan piutang usaha PT DIN, seperti trial balance, sub-ledger piutang usaha, surat konfirmasi, rekapitulasi hasil balasan konfirmasi, dokumen pendukung transaksi, dan kertas kerja audit yang relevan. Data primer ini menjadi dasar utama untuk menilai bagaimana auditor membangun bukti audit dan bagaimana perbedaan atau ketiadaan respons ditindaklanjuti. Data sekunder diperoleh dari buku teks auditing, standar audit, artikel jurnal, dan literatur akademik yang membahas audit evidence, prosedur konfirmasi, teknologi audit, skeptisisme profesional, dan desain prosedur alternatif. Penggunaan kedua jenis data tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan praktik audit di lapangan dengan kerangka konseptual dan perkembangan literatur audit yang lebih mutakhir (Barr-Pulliam et al., 2023; Byrnes et al., 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KAP JAPP. Posisi penulis dalam lingkungan kerja audit memberikan akses langsung untuk mengamati pelaksanaan prosedur, memahami alur dokumen, serta menelaah bukti audit yang digunakan dalam penugasan. Dalam konteks pembelajaran audit, pengalaman langsung semacam ini penting karena memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap integrasi prosedur, dokumentasi, dan penilaian profesional auditor (Popova & Wright, 2018; Elsayed & Hassan, 2024). Meski demikian, penelitian ini tetap menempatkan data dokumenter dan hasil observasi sebagai dasar analisis, sehingga pengalaman lapangan tidak digunakan secara subjektif, melainkan diverifikasi melalui dokumen dan konfirmasi informasi dari pihak terkait. Adapun penjelasan lebih rinci terkait dengan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas audit yang dilakukan oleh auditor di KAP JAPP. Melalui keterlibatan langsung selama magang di KAP JAPP, penulis mengamati dan mencatat aktivitas audit secara langsung untuk memahami bagaimana prosedur audit piutang usaha dijalankan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi awal dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara bisa bersifat terstruktur (dengan daftar pertanyaan yang

sudah disiapkan) maupun tidak terstruktur (dengan pertanyaan spontan sesuai situasi). Tujuannya adalah mendapatkan wawasan mendalam dari narasumber yang relevan.

3. Dokumentasi

Penulis juga mengumpulkan data dengan menelaah berbagai dokumen dan laporan keuangan yang sedang diaudit. Ini termasuk dokumen seperti catatan pemeriksaan, rencana kerja audit, serta laporan keuangan terkait.

4. Studi Kepustakaan

Selain itu, penulis mencari referensi dari berbagai buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan audit dan laporan keuangan, guna memperkuat landasan teori dalam artikel ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai tahapan prosedur audit piutang usaha. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan prosedur di lapangan dengan tujuan pengujian asersi yang hendak dibuktikan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penulis mengidentifikasi urutan pelaksanaan konfirmasi piutang, mulai dari pemilihan sampel hingga evaluasi hasil. Kedua, penulis membandingkan balasan konfirmasi dengan catatan piutang usaha pada sub-ledger untuk mengidentifikasi adanya perbedaan, pengecualian, atau ketidaksesuaian. Ketiga, penulis menelaah tindakan auditor atas pelanggan yang tidak merespons, termasuk pemeriksaan bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca dan dokumen transaksi pendukung. Keempat, penulis mengevaluasi apakah rangkaian prosedur tersebut telah menghasilkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung asersi keberadaan dan hak kepemilikan.

Pendekatan analisis ini juga mempertimbangkan prinsip risk-based auditing, yaitu bahwa prosedur audit seharusnya disesuaikan dengan tingkat risiko salah saji material yang melekat pada akun dan populasi yang diuji. Dalam konteks piutang usaha, pelanggan dengan saldo besar, pola transaksi kompleks, atau indikasi keterlambatan pembayaran dapat memerlukan perhatian yang lebih intensif. Literatur menunjukkan bahwa revisi rencana audit dan penajaman prosedur berdasarkan penilaian risiko merupakan bagian penting dari kualitas audit, terutama ketika auditor menghadapi area yang rentan terhadap salah saji atau fraud risk (Bauer et al., 2020; Sab u et al., 2021). Oleh karena itu, analisis penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur yang dilakukan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan risiko akun piutang usaha yang diaudit. Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan berbasis risiko membantu memastikan bahwa konfirmasi piutang ditempatkan dalam kerangka audit yang proporsional terhadap kompleksitas penugasan (Tiu et al., 2020).

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan cross-check antar-dokumen serta informasi dari auditor. Hasil observasi dibandingkan dengan hasil wawancara dan bukti dokumenter untuk memastikan konsistensi data. Jika terdapat perbedaan informasi, peneliti menelusuri kembali dokumen pendukung dan konteks proses audit sebelum menarik simpulan. Langkah ini penting karena penelitian audit sangat bergantung pada kemampuan peneliti membaca keterkaitan antar-bukti secara hati-hati dan menjaga objektivitas dalam menilai kecukupan bukti. Literatur mengenai audit judgment juga menunjukkan bahwa cara bukti disusun, divisualisasikan, atau diurutkan dapat memengaruhi penilaian auditor, sehingga analisis perlu dilakukan secara sistematis agar bias kognitif dapat diminimalkan (Chang & Luo, 2019; Fehrenbacher et al., 2020; Guiral & Esteo, 2006). Dengan demikian, proses triangulasi dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketelitian interpretasi.

Selain itu, penelitian ini memperhatikan pentingnya skeptisisme profesional dalam membaca hasil konfirmasi maupun bukti alternatif. Respons konfirmasi yang diterima tidak secara otomatis dianggap final, melainkan tetap direkonsiliasi dengan catatan klien dan dievaluasi dalam konteks transaksi yang mendasarinya. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa teknologi, otomatisasi, dan rutinitas kerja audit dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pertimbangan jika auditor

tidak mempertahankan evaluasi kritis atas bukti yang tersedia (Barr-Pulliam et al., 2023; Caster et al., 2020; Fehrenbacher et al., 2020). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, efektivitas prosedur konfirmasi tidak dinilai semata-mata dari banyaknya respons yang diterima, tetapi juga dari bagaimana auditor menelaah kualitas respons tersebut dan bagaimana prosedur alternatif dijalankan ketika respons tidak tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Audit

KAP JAPP merupakan kantor akuntan publik yang berdomisili di Menteng, Jakarta Pusat, dan dalam penelitian ini bertindak sebagai auditor eksternal atas PT DIN. PT DIN adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pipa baja *cold drawn* untuk sektor otomotif. Berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024, saldo piutang usaha PT DIN tercatat sebesar Rp31.031.760.136. Besarnya saldo tersebut menunjukkan bahwa piutang usaha merupakan akun yang signifikan dalam laporan keuangan dan, oleh karena itu, memerlukan prosedur audit yang memadai untuk memastikan bahwa saldo yang disajikan benar-benar ada, menjadi hak perusahaan, dan disajikan secara andal.

Dalam konteks audit laporan keuangan, signifikansi piutang usaha tidak hanya berkaitan dengan besaran nominalnya, tetapi juga dengan risiko salah saji yang melekat pada akun tersebut. Risiko tersebut dapat timbul dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat, pencatatan piutang yang tidak didukung transaksi yang sah, perbedaan waktu pengakuan, maupun lemahnya pengendalian atas penagihan. Karena itu, prosedur konfirmasi eksternal menjadi penting sebagai salah satu sumber bukti audit yang berasal dari pihak ketiga dan relatif lebih independen dibandingkan bukti internal. Hal ini sejalan dengan literatur yang menempatkan konfirmasi piutang usaha sebagai prosedur yang sangat relevan untuk mendukung asersi keberadaan, meskipun tetap memiliki keterbatasan untuk menjawab seluruh asersi atas piutang usaha (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Barr-Pulliam et al., 2023). Adapun prosedur konfirmasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Jumlah *Sample*

Dalam audit atas PT DIN, KAP JAPP menerapkan *statistical sampling* dengan pendekatan *judgment sampling* untuk menentukan pelanggan yang akan dikonfirmasi. Pendekatan ini digunakan karena auditor perlu memusatkan prosedur audit pada saldo piutang yang paling signifikan dan berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara material. Dengan teknik ini, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak penuh, melainkan berdasarkan pertimbangan profesional auditor terhadap besarnya nilai piutang, tingkat risiko, dan relevansi saldo terhadap tujuan audit. Dari total 54 pelanggan, sebanyak 44 pelanggan dipilih sebagai sampel karena memiliki saldo piutang yang dinilai material. Sampel tersebut kemudian menjadi dasar pengiriman surat konfirmasi kepada masing-masing pelanggan. Melalui prosedur ini, auditor dapat memperoleh bukti audit eksternal yang lebih andal untuk menilai apakah saldo piutang yang dicatat benar-benar ada pada tanggal pelaporan serta apakah PT DIN memiliki hak yang sah untuk menagih piutang usaha tersebut sesuai dengan catatan dalam laporan keuangan klien.

2. Membuat dan Mengirimkan Surat Konfirmasi Audit

Setelah sampel ditetapkan, auditor menyusun dan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan yang terpilih sebagai responden audit. Jenis konfirmasi yang digunakan adalah konfirmasi positif, yaitu prosedur yang mengharuskan pelanggan memberikan tanggapan baik ketika mereka menyetujui maupun tidak menyetujui saldo piutang yang tercantum dalam surat tersebut. Penggunaan konfirmasi positif dinilai tepat karena saldo piutang yang diuji bersifat material dan memiliki pengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Dibandingkan dengan konfirmasi negatif, prosedur ini memberikan bukti audit yang lebih kuat karena auditor memperoleh verifikasi langsung dari pihak eksternal. Dengan demikian, auditor dapat menilai apakah saldo piutang yang dicatat oleh perusahaan benar-benar ada dan diakui oleh pelanggan. Literatur audit juga menegaskan bahwa konfirmasi positif merupakan prosedur yang paling informatif untuk menguji asersi keberadaan, terutama pada akun dengan nilai signifikan atau risiko salah saji yang tinggi (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Sillanpää & Hautamäki, 2020).

ENTITY'S LETTERHEAD

Tangerang, January 31, 2024

(Definisikan lingkup asersi)

Attn: Finance and Accounting Department

Audit Confirmation Request

Dear Sir/Madam,

Our auditors,

KAP Joachim Adhi Piter Pothak & Rekan
 A member of **The Leading Edge Alliance**
 Gedung Mekar, 24th Floor
 Jalan Imam Bonjol No. 41
 Jakarta 10110, INDONESIA
 Telp. (021) 261-6471
 Fax. (021) 261-7452
 Attn: **Peter Pothak / Jochem Adhi**

are now engaged in an examination of our accounts and we should like you to advise them whether or not this statement is correct. This is merely a request for confirmation, and not for payment. According to our records as of **December 31, 2023**, the balance of our accounts receivable from you is **IDR 2,777,136,710**.

If the balance agree with your records, please sign this letter in the space provided below and return it by fax or mail directly to our auditors, and if the balance does not agree with your records, please write giving full details of the difference. A return envelope is enclosed for your convenience in replying directly to our auditors.

Considering our firm corporate deadlines, it will be much appreciated if you reply it not later than **January 31, 2024**.

Thank you for your cooperation.

Yours faithfully,

President Director

(Please do not cover off this part)

Confirmation

Our records show that a balance of _____ is due _____ as of **December 31, 2023** except as noted below:

Name of Company: _____

Name in print: _____ Position: _____

Signature: _____ Date: _____

Gambar 1. Surat Konfirmasi KAP JAPP (Sumber: KAP JAPP)

Dari hasil sample yang sudah ditentukan, selanjutnya auditor akan mengirimkan berupa surat konfirmasi kepada pelanggan untuk menguji asersi keberadaan dan hak kepemilikan piutang usaha dari PT DIN. Dalam proses konfirmasi, KAP JAPP memilih menggunakan jenis konfirmasi positif. Artinya, setiap surat konfirmasi yang dikirim kepada pelanggan harus mendapatkan balasan, baik jika saldo yang tercantum sudah benar maupun jika terdapat perbedaan.

Dalam proses konfirmasi yang dilakukan KAP JAPP surat konfirmasi dibuat oleh auditor, kemudian diserahkan terlebih dahulu kepada PT DIN untuk mendapatkan tanda tangan. Setelah ditandatangani, surat tersebut dikirimkan kepada pelanggan oleh PT DIN. Tanggapan dari pelanggan atas surat konfirmasi tersebut langsung dikirim ke alamat KAP JAPP. Pendekatan ini sejalan dengan *International Standard on Auditing (ISA) 505* tentang *External Confirmations*, yang menekankan pentingnya kontrol independen auditor dalam proses konfirmasi untuk menjaga objektivitas dan keandalan bukti audit.

Namun, jika pelanggan tidak memberikan balasan, auditor akan melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup.

1. Auditor akan menelusuri apakah ada pembayaran dari pelanggan setelah tanggal neraca (*test of subsequent events*). Jika ada, hal ini menjadi bukti bahwa piutang tersebut benar-benar ada.
2. Auditor akan memeriksa dokumen pendukung transaksi (*vouching*) seperti faktur, surat jalan, atau kontrak. Tujuannya adalah memastikan bahwa piutang yang tercatat memang sah dan valid.

Melalui dua langkah ini, auditor tetap dapat memastikan kewajaran saldo piutang meskipun tanpa konfirmasi langsung dari pelanggan.

3. Pemantauan dan Pencatatan Respon dari Pihak Ketiga

		KAP Joachim Adhi Piter Pothak & Rekan		PT DIN		December 31, 2024		Accounts Receivable Confirmation Circularization Summary		Prepared By DIN		Date 17 Jan 25		Index F.5											
CUSTOMER NAME				Confirmations Control				Confirmation Reply				Analysis from Confirmation Replies				No Reply				Explanation		Comments			
Date Sent Out				Balance Per Sub Ledger		Equivalent in		Date Received		Amount		D/T Different		Timing Difference		Client Error		Total Error		Total		Verified		Not Verified	
				USD		a = b		W/P Ref		c		d		e		f		g = d - e		h		i		j	
ACCOUNT RECEIVABLE																									
1	Account Receivable - PT	20 January 2025	1,058,685,921	1,058,685,921			24 January 2025	1,058,685,717						(24,900,204)						1,011,265,513			78,700,204		
2	Account Receivable - PT	20 January 2025	1,508,471,444	1,508,471,444			23 January 2025	2,288,028,292												1,079,262,500			1,079,262,500		
3	Account Receivable - PT	20 January 2025	2,077,135,750	2,077,135,750			26 January 2025	2,771,176,128												1,777,176,128			1,777,176,128		
4	Account Receivable - CV	20 January 2025	840,790,982	840,790,982			5 February 2025	849,700,982												849,700,982			849,700,982		
5	Account Receivable - PT	20 January 2025	3,193,151,898	3,193,151,898			26 January 2025	3,283,212,598						1,120						3,283,212,598		(1,120)	3,283,212,598		
6	Account Receivable - PT	20 January 2025	464,931,492	464,931,492			23 January 2025	463,931,492												464,931,492			464,931,492		
7	Account Receivable - PT	20 January 2025	4,460,785,860	4,460,785,860			24 January 2025	4,460,785,860												4,460,785,860			4,460,785,860		
8	Account Receivable - PT	20 January 2025	2,136,068,819	2,136,068,819			24 January 2025	2,056,068,921						2						2,056,068,921		(2)	2,056,068,921		
9	Account Receivable - PT	20 January 2025	956,002,818	956,002,818			3 February 2025	994,001,219												994,001,219			994,001,219		
10	Account Receivable - PT	20 January 2025	376,947,800	376,947,800			3 February 2025	378,947,800												378,947,800			378,947,800		
11	Account Receivable - PT	20 January 2025	1,403,937,126	1,403,937,126			30 January 2025	1,603,937,126												1,603,937,126		(5)	1,603,937,126		
12	Account Receivable - PT	20 January 2025	515,585,500	515,585,500			31 January 2025	515,585,500						5						515,585,500			515,585,500		
13	Account Receivable - PT	20 January 2025	742,834,756	742,834,756			3 February 2025	742,834,756												742,834,756			742,834,756		
14	Account Receivable - CV	20 January 2025	1,101,006,790	1,101,006,790			24 January 2025	1,211,006,790												1,201,006,790			1,201,006,790		
15	Account Receivable - PT	20 January 2025	780,029,947	780,029,947			24 January 2025	780,029,947												780,029,947			780,029,947		
16	Account Receivable - PT	20 January 2025	927,032,680	927,032,680			25 January 2025	907,031,620												907,031,620			907,031,620		
17	Account Receivable - PT	20 January 2025	373,673,220	373,673,220			26 January 2025	373,673,220												373,673,220			373,673,220		
18	Account Receivable - PT	20 January 2025	434,393,990	434,393,990			25 January 2025	434,501,990												434,501,990			434,501,990		
19	Account Receivable - PT	20 January 2025	17,158,000	17,158,000			31 January 2025	17,158,000												17,158,000			17,158,000		
20	Account Receivable - PT	20 January 2025	321,395,416	321,395,416			30 January 2025	321,395,416												321,395,416			321,395,416		
21	Account Receivable - PT	20 January 2025	387,538,820	387,538,820			24 January 2025	387,538,820												387,538,820			387,538,820		
22	Account Receivable - PT	20 January 2025	603,779,112	603,779,112			13 February 2025	603,779,112												603,779,112			603,779,112		
23	Account Receivable - PT	20 January 2025	917,447,190	917,447,190			30 January 2025	948,126,636						(917,447,190)						948,126,636			917,447,190		
24	Account Receivable - PT	20 January 2025	546,126,836	546,126,836			31 January 2025	546,126,836												546,126,836			546,126,836		
25	Account Receivable - PT	20 January 2025	479,331,197	479,331,197			31 January 2025	580,472,832						101,371,635						580,472,832			(101,371,635)		
26	Account Receivable - CV	20 January 2025	120,000,000	120,000,000			23 January 2025	120,000,000												120,000,000			120,000,000		
Total Confirmation Sent Out						77,837,031,197		77,837,031,197						26,720,000,000		240,153,262,111		-		26,510,262,000				Total Confirmation No Reply	
Total Balance per General Ledger						91,891,768,116		91,891,768,116						26,720,000,000		240,153,262,111				26,510,262,000				Total Confirmation Reply	
Percentage of Confirmation Sent Out						77.837031197%		77.837031197%						26.720000000%		240.153262111%				26.510262000%				Total Confirmation Reply	

Setelah menerima balasan dari surat konfirmasi, auditor akan menyusun rekapitulasi yang berisi perbandingan antara saldo piutang usaha dalam laporan keuangan PT DIN dengan saldo yang dikonfirmasi oleh pelanggan, termasuk tanggal balasan yang diterima. Dari balasan konfirmasi diatas hanya satu pelanggan yang tidak membalas. Untuk perbedaan atas pencatatan piutang klien, auditor telah menyelusuri dan mendapati hasil dari selisih tersebut yaitu nilai DPP tidak tercantum karena pertukaran faktur dilakukan pada Januari 2025 dan beberapa selisih masih dibawah nilai material. Penelusuran dokumen menunjukkan bahwa pengiriman barang telah terjadi pada Desember 2024, sehingga pengakuan piutang dinilai masih sesuai dengan prinsip *cut-off* yang benar.

Berdasarkan hasil diatas menunjukan konfirmasi piutang usaha yang dilakukan pada PT DIN memberikan bukti bahwa piutang usaha yang dicatat memang benar adanya. Oleh karena itu, asersi keberadaan terbukti karena pelanggan PT DIN memberikan tanggapan dan mengakui bahwa mereka memiliki utang kepada perusahaan dan asersi hak kepemilikan juga terpenuhi dari terbalasnya surat konfirmasi antara jumlah piutang yang tercatat di PT DIN dan saldo utang yang diakui oleh pelanggan. PT DIN berhak untuk menagih atas piutang terhadap pelanggan.

Prosedur ini juga mendukung keandalan informasi pada laporan piutang usaha PT DIN, di mana saldo yang dikonfirmasi oleh pelanggan sesuai dengan yang tercatat sebesar Rp31.031.760.136, sehingga auditor menyatakan data tersebut valid dan dapat diandalkan.

5. PIUTANG USAHA		5. ACCOUNTS RECEIVABLE	
	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT	17.538.000	17.538.000	PT
Pihak ketiga:			Third parties:
PT	4.460.785.860	3.629.522.400	PT
PT	3.383.151.898	3.914.274.500	PT
PT	2.777.176.710	95.055.683	PT
PT	2.036.068.919	1.551.114.118	PT
PT	1.603.837.185	850.085.597	PT
PT	1.504.671.444	1.817.605.012	PT
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%)	15.248.530.120	13.430.177.564	Others (below 5%, each)
Total, bersih	<u>31.031.760.136</u>	<u>25.305.372.874</u>	Total, net
Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan piutang pada akhir tahun, Entitas berpendapat bahwa tidak perlu membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian, karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut telah terlaksana dengan baik.		Based on review of the status of account receivable at end of year, the Entity is of the opinion that it is not necessary to provide allowance for expected credit loss, because the management believes that receivable are fully performing.	

Gambar 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Akun Piutang Usaha (Sumber: KAP JAPP)

Prosedur konfirmasi piutang usaha merupakan salah satu prosedur audit substantif yang penting dalam pemeriksaan laporan keuangan, terutama untuk memperoleh bukti audit yang andal mengenai saldo piutang yang disajikan oleh entitas. Melalui prosedur ini, auditor independen mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan atau pihak ketiga yang memiliki hubungan transaksi dengan perusahaan untuk memverifikasi apakah saldo piutang yang tercatat dalam pembukuan klien sesuai dengan catatan yang dimiliki oleh pihak eksternal. Karena respons berasal dari pihak ketiga yang relatif independen dari proses penyusunan laporan keuangan, bukti yang diperoleh melalui konfirmasi pada umumnya dipandang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dalam literatur audit, konfirmasi piutang usaha secara konsisten diposisikan sebagai prosedur yang paling relevan untuk mendukung asersi keberadaan, meskipun kemampuannya untuk menjawab asersi lain, seperti kelengkapan dan penilaian, lebih terbatas (Guiral & Esteo, 2006; Vagner, 2022; Barr-Pulliam et al., 2023).

Dalam kasus PT DIN, prosedur konfirmasi digunakan untuk menguji dua asersi audit utama, yaitu keberadaan (existence) dan hak kepemilikan (rights and obligations/rights) atas piutang usaha yang tercatat dalam laporan keuangan. Asersi keberadaan menuntut auditor untuk memastikan bahwa saldo piutang yang disajikan benar-benar ada pada tanggal pelaporan dan bukan merupakan angka fiktif atau hasil salah saji pencatatan. Sementara itu,

asersi hak kepemilikan mengharuskan auditor menilai apakah perusahaan memang memiliki hak yang sah untuk menagih piutang tersebut dari pelanggan. Dalam praktiknya, pengujian terhadap dua asersi ini tidak hanya dilakukan melalui balasan surat konfirmasi, tetapi juga didukung oleh pemeriksaan dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat jalan, bukti penerimaan barang, serta dokumen pembayaran setelah tanggal neraca apabila diperlukan. Kombinasi antara bukti eksternal dan bukti dokumenter internal ini penting karena memungkinkan auditor membangun keyakinan yang lebih kuat atas validitas saldo piutang yang dilaporkan (Caster et al., 2020; Barr-Pulliam et al., 2023).

Hasil pelaksanaan prosedur pada PT DIN menunjukkan bahwa konfirmasi piutang berhasil mendukung asersi keberadaan dan hak kepemilikan. Saldo piutang pelanggan yang tercatat dalam laporan keuangan terbukti benar-benar ada dan dimiliki oleh PT DIN sebagaimana didukung oleh balasan surat konfirmasi dari pelanggan. Ketika pelanggan mengakui saldo yang tercantum dalam konfirmasi, auditor memperoleh bukti langsung bahwa piutang tersebut eksis pada tanggal pelaporan. Pada saat yang sama, kesesuaian antara saldo yang dikonfirmasi dan dokumen transaksi pendukung memperkuat kesimpulan bahwa PT DIN memiliki hak yang sah atas piutang tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa konfirmasi piutang merupakan prosedur yang sangat efektif untuk memverifikasi keberadaan akun piutang, khususnya ketika dikombinasikan dengan penelusuran dokumen yang mendasari transaksi (Giral & Esteo, 2006; Vagner, 2022). Dengan demikian, konfirmasi dalam audit PT DIN tidak hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural, tetapi benar-benar menjadi alat verifikasi substantif yang mendukung simpulan auditor.

Selain menguji keberadaan dan hak kepemilikan, auditor juga menilai kewajaran nilai piutang (*valuation*) dan kesesuaian penyajiannya dengan PSAK 71 tentang *Expected Credit Loss* (ECL). Penilaian ini penting karena keberadaan piutang tidak otomatis berarti seluruh saldo dapat direalisasikan penuh. Dalam kerangka PSAK 71, entitas diwajibkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang berdasarkan ekspektasi kerugian kredit, bukan hanya ketika terdapat bukti kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu, auditor perlu menilai apakah kebijakan perusahaan dalam membentuk cadangan telah mencerminkan profil risiko piutang yang sebenarnya. Dalam kasus PT DIN, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 0,5% dari total saldo piutang, dengan mayoritas umur piutang kurang dari 90 hari dan tidak terdapat piutang yang telah lewat jatuh tempo secara signifikan. Berdasarkan kondisi tersebut, auditor menilai bahwa cadangan yang dibentuk telah memadai dan konsisten dengan tingkat risiko kredit yang relatif rendah. Temuan ini memperlihatkan bahwa audit piutang usaha tidak berhenti pada verifikasi keberadaan saldo, tetapi juga mencakup evaluasi kewajaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan (Barr-Pulliam et al., 2023; Vagner, 2022).

Meskipun prosedur konfirmasi pada PT DIN menunjukkan hasil yang efektif, tinjauan kritis tetap diperlukan untuk menilai kualitas pelaksanaannya. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan klien dalam proses pengiriman surat konfirmasi. Dari perspektif audit, keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan risiko dan bias apabila auditor tidak mempertahankan pengendalian yang memadai atas proses konfirmasi. Arens et al. (2020) menegaskan bahwa reliabilitas bukti dari konfirmasi eksternal sangat dipengaruhi oleh independensi auditor dalam mengelola proses, mulai dari penentuan penerima, penyiapan surat, verifikasi alamat, hingga penerimaan balasan. Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Standar Audit (SA) atau International Standard on Auditing (ISA) 505, yang menempatkan pengendalian auditor atas prosedur konfirmasi sebagai syarat utama agar bukti yang diperoleh tetap andal. Dalam konteks PT DIN, meskipun balasan diarahkan langsung kepada KAP JAPP, auditor tetap harus memastikan bahwa proses pengiriman, penyiapan amplop, dan pengecekan alamat dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak mengurangi kualitas bukti audit. Hal ini penting karena konfirmasi yang secara formal tampak memadai belum tentu sepenuhnya andal apabila rantai pengendaliannya tidak dijaga secara independen (Caster et al., 2020; Barr-Pulliam et al., 2023).

Selain itu, sebagai penelitian dengan desain *single-case study*, temuan ini juga memiliki keterbatasan metodologis. Hasil yang diperoleh merefleksikan praktik audit pada satu entitas, yaitu PT DIN, dan satu kantor akuntan publik, yaitu KAP JAPP. Oleh karena itu,

simpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung sebagai representasi praktik audit standar pada seluruh KAP atau seluruh sektor industri. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan penelitian, karena studi kasus justru memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai bagaimana prosedur audit dijalankan dalam konteks nyata, bagaimana bukti dikumpulkan, dan bagaimana auditor menyusun pertimbangan profesionalnya. Dalam penelitian audit, kedalaman konteks semacam ini tetap penting untuk memperkaya pemahaman terhadap praktik yang sesungguhnya di lapangan (Ackers, 2016; Byrnes et al., 2018).

Dengan demikian, prosedur konfirmasi yang dilakukan KAP JAPP pada audit PT DIN dapat dinilai efektif dalam memperoleh bukti audit yang cukup, tepat, dan relevan untuk mendukung asersi keberadaan dan hak kepemilikan piutang usaha. Efektivitas tersebut tampak dari keberhasilan auditor memperoleh balasan konfirmasi yang konsisten dengan catatan klien, didukung oleh pemeriksaan dokumen transaksi yang memadai dan evaluasi atas cadangan kerugian piutang sesuai PSAK 71. Temuan ini juga menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara auditor dan klien dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan prosedur tanpa harus mengurangi independensi profesional auditor, sepanjang pengendalian atas proses konfirmasi tetap berada di tangan auditor. Oleh sebab itu, konfirmasi piutang usaha tetap dapat dipandang sebagai prosedur audit yang sentral, tetapi efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh desain pelaksanaan, kualitas pengawasan, dan kemampuan auditor dalam mengintegrasikan bukti konfirmasi dengan bukti pendukung lainnya secara kritis dan profesional (Guiral & Esteo, 2006; Arens et al., 2020; Barr-Pulliam et al., 2023).

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis prosedur konfirmasi piutang usaha terhadap PT DIN oleh KAP JAPP diketahui bahwa sekitar 97,7% dari surat konfirmasi yang dikirim oleh auditor kepada pelanggan memberikan jawaban, 2,3% sisanya tidak memberikan jawaban konfirmasi. Oleh karena itu, terhadap balasan konfirmasi yang tidak kembali diterapkan prosedur alternatif berupa pengecekan pembayaran setelah tanggal neraca (*test of subsequent events*), yang berhasil membuktikan kebenaran atas piutang usaha tersebut. Prosedur konfirmasi piutang usaha yang dilakukan oleh KAP JAPP meliputi penentuan jumlah *sample*, pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi audit serta pemantauan dan pencatatan respon dari pihak ketiga. Melalui langkah-langkah ini, asersi keberadaan (*existence*) dan hak kepemilikan (*rights*) dapat dibuktikan kebenarannya.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur audit eksternal dengan memperkuat bukti empiris bahwa prosedur konfirmasi positif yang disertai pengendalian independen auditor dapat meningkatkan reliabilitas bukti audit, sesuai dengan prinsip ISA 505 tentang *External Confirmations*. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi auditor dalam merancang strategi konfirmasi yang efektif, terutama pada perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang kompleks atau keterlibatan klien dalam proses pengiriman konfirmasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus (*single-case study*) di sektor manufaktur otomotif, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan ke seluruh jenis industri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan studi kasus (*multi-case study*) pada beberapa KAP atau klien dengan industri berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi implementasi prosedur konfirmasi dan mitigasi risiko audit yang terkait.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas fokus kajian terhadap aspek lain dalam audit piutang usaha, seperti efektivitas sistem pengendalian internal, evaluasi risiko kredit, serta penerapan teknologi audit berbasis digital dalam proses konfirmasi piutang. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik untuk menguji efektivitas berbagai metode konfirmasi baik konfirmasi positif maupun negatif dalam menghasilkan bukti audit yang andal. Pendekatan

ini dapat memberikan gambaran empiris yang lebih kuat mengenai hubungan antara tingkat respons pelanggan, materialitas saldo piutang, dan kualitas bukti audit yang diperoleh.

Dari sisi praktik, penguatan koordinasi antara auditor, klien, dan pihak eksternal menjadi faktor kunci agar proses konfirmasi berjalan lebih efisien dan bebas dari potensi bias. Hambatan yang mungkin timbul dalam kegiatan serupa antara lain keterlambatan tanggapan dari pihak ketiga, keterbatasan waktu audit, serta kesulitan dalam mengakses dokumen pendukung tertentu. Oleh karena itu, perencanaan audit yang matang, komunikasi yang efektif, dan strategi pengumpulan data yang sistematis sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan reliabilitas hasil audit. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan bukti empiris yang terukur tentang efektivitas prosedur konfirmasi dalam menurunkan risiko audit, sekaligus memperkaya pemahaman teoretis dan praktis dalam bidang auditing modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak pemberi dana dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) JAPP yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta data yang diperlukan dalam proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, beserta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan akademik, serta fasilitas selama penyusunan artikel ini. Dukungan dan kontribusi seluruh pihak telah memberikan peran yang sangat berarti bagi tersusunnya penelitian ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackers, B. (2016). An exploration of internal audit's corporate social responsibility role – insights from South Africa. *Social Responsibility Journal*, 12(4), 719-739. <https://doi.org/10.1108/srj-01-2016-0003>
- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Buku I Edisi 5 Salemba Empat.
- Amri, N. F. (2024, Agustus 22). PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 71. Diambil kembali dari e-akuntansi: <https://e-akuntansi.com/psak-pernyataan-standar-akuntansi-keuangan-nomor-71/>
- Ardianingsih, A. (2021). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M.S. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (17th Edition)*. Pearson Education.
- Barr-Pulliam, D., Calvin, C., Eulerich, M., & Maghaky, A. (2023). Audit evidence, technology, and judgement: A review of the literature in response to ED-500. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 35(1), 36-67. <https://doi.org/10.1111/jifm.12192>
- Bauer, T., Hillison, S., Peecher, M., & Pomeroy, B. (2020). Revising Audit Plans to Address Fraud Risk: A Case of “Do as I Advise, Not as I Do”? *Contemporary Accounting Research*, 37(4), 2558-2589. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12590>
- Byrnes, P., Alawadhi, A., Gullvist, B., Brown-Liburd, H., Teeter, R., Warren, J., ... & Vasarhelyi, M. (2018). Evolution of Auditing: From the Traditional Approach to the Future Audit., 285-297. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181014>
- Caster, P., Elder, R., & Janvrin, D. (2020). An Exploration of Bank Confirmation Process Automation: A Longitudinal Study. *Journal of Information Systems*, 35(3), 1-16. <https://doi.org/10.2308/isys-19-038>
- Caster, P., Elder, R., & Janvrin, D. (2020). An Exploration of Bank Confirmation Process Automation: A Longitudinal Study. *Journal of Information Systems*, 35(3), 1-16. <https://doi.org/10.2308/isys-19-038>
- Castro, V., Gul, F., Muttakin, M., & Mihret, D. (2019). Optimistic tone and audit fees: Some Australian evidence. *International Journal of Auditing*, 23(2), 352-364. <https://doi.org/10.1111/ijau.12165>

- Chang, C. and Luo, Y. (2019). Data visualization and cognitive biases in audits. *Managerial Auditing Journal*, 36(1), 1-16. <https://doi.org/10.1108/maj-08-2017-1637>
- Elsayed, N. and Hassan, M. (2024). Audit simulation and learning styles: Enhancing students' experiential learning and performance at a MENA university. *International Journal of Auditing*. <https://doi.org/10.1111/ijau.12345>
- Fehrenbacher, D., Triki, A., & Weisner, M. (2020). Can multitasking influence professional scepticism?. *Accounting and Finance*, 61(1), 1277-1306. <https://doi.org/10.1111/acfi.12627>
- Fehrenbacher, D., Triki, A., & Weisner, M. (2020). Can multitasking influence professional scepticism?. *Accounting and Finance*, 61(1), 1277-1306. <https://doi.org/10.1111/acfi.12627>
- Guiral, A. and Esteo, F. (2006). Are Spanish auditors skeptical in going concern evaluations?. *Managerial Auditing Journal*, 21(6), 598-620. <https://doi.org/10.1108/02686900610674889>
- Hery. (2019). *Auditng: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Majdalawieh, M., Sahraoui, S., & Barkhi, R. (2012). Intra/inter process continuous auditing (IIPCA), integrating CA within an enterprise system environment. *Business Process Management Journal*, 18(2), 304-327. <https://doi.org/10.1108/14637151211225216>
- Meidawati, N. (2024). Audit Atas Piutang Usaha PT X. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1-11.
- Mulyadi. (2022). *Auditing: Suatu Pengantar. 15th ed*. Salemba Empat.
- Pinto, I. and Morais, A. (2018). What matters in disclosures of key audit matters: Evidence from Europe. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 30(2), 145-162. <https://doi.org/10.1111/jifm.12095>
- Pinto, I., Morais, A., & Quick, R. (2020). The impact of the precision of accounting standards on the expanded auditor's report in the European Union. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 40, 100333. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100333>
- Popova, V. and Wright, N. (2018). Taking on Too Much, Too Soon? An Exploration of Experiential Learning of Novice Auditors in an Offshoring Setting. *Current Issues in Auditing*, 13(1), A1-A14. <https://doi.org/10.2308/ciia-52330>
- Rachman, A. (2020). Audit Berdasarkan International Standard on Auditing atas Piutang Usaha pada PT ZZZ oleh KAP Suryadi dan Rizal.
- Sabău, A., Mare, C., & Safta, I. (2021). A Statistical Model of Fraud Risk in Financial Statements. Case for Romania Companies. *Risks*, 9(6), 116. <https://doi.org/10.3390/risks9060116>
- Setiawan, D. (2020). Prosedur Konfirmasi Piutang Usaha di PT. KDI. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*.
- Shin, H. and Park, S. (2022). Does human resource investment in internal controls and information technology improve audit efficiency?. *International Journal of Auditing*, 26(4), 515-533. <https://doi.org/10.1111/ijau.12293>
- Sillanpää, M. and Hautamäki, J. (2020). Social Engineering Intrusion., 1-5. <https://doi.org/10.1145/3406601.3406631>
- Srivastava, R. and Liu, L. (2003). Applications of Belief Functions in Business Decisions: A Review. *Information Systems Frontiers*, 5(4), 359-378. <https://doi.org/10.1023/b:isfi.0000005651.93751.4b>
- Srivastava, R. and Lu, H. (2002). Structural analysis of audit evidence using belief functions. *Fuzzy Sets and Systems*, 131(1), 107-120. [https://doi.org/10.1016/s0165-0114\(01\)00259-7](https://doi.org/10.1016/s0165-0114(01)00259-7)
- Tiu, C., Shinde, R., Yap, C., Baikady, B., Banerji, U., Minchom, A., ... & Lopez, J. (2020). A risk-based approach to experimental early phase clinical trials during the COVID-19 pandemic. *The Lancet Oncology*, 21(7), 889-891. [https://doi.org/10.1016/s1470-2045\(20\)30339-9](https://doi.org/10.1016/s1470-2045(20)30339-9)
- Vagner, B. (2022). The effect of personalized audit communication and evidence inconsistency on auditor judgments and decision-making. *Managerial Auditing Journal*, 37(8), 1038-1061. <https://doi.org/10.1108/maj-09-2020-2857>

-
- Vagner, B. (2022). The effect of personalized audit communication and evidence inconsistency on auditor judgments and decision-making. *Managerial Auditing Journal*, 37(8), 1038-1061. <https://doi.org/10.1108/maj-09-2020-2857>
- Yunike Chirstie Elovani, A. S. (2025). Prosedur Konfirmasi Piutang Usaha PT ABC oleh KAP TST. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 6, No. 1, 1-7.
- Zhang, J., Veltrop, D., Hooghiemstra, R., & Rink, F. (2023). Does Auditor Resilience Mitigate the Effects of Multiple Team Memberships on Quality Threatening Behaviors?. *Auditing a Journal of Practice & Theory*, 42(4), 179-203. <https://doi.org/10.2308/ajpt-2020-022>